



*RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-PD) TAHUN 2022*



**DINAS PARIWISATA KABUPATEN  
BONE**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap Tahun dalam bentuk dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bone, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Pariwisata Kabupaten Bone atas seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 untuk masa pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja Tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada Tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini mempunyai fungsi, yaitu :

**“Sebagai Sarana Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Untuk Memenuhi Kewajiban Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kepada Bupati Bone”.**

Dengan demikian, Kami berharap penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 ini menjadi media perencanaan kinerja yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada Tahun 2022 guna mendorong peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 13 September 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE,**



**IL. ANDI PROMAL PAWLST., M.Si.**

Pangkat: Pembina Tingkat I

NIP. 19700517 199503 1 003



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN LALU DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	19
2.4 Analisis SWOT ( <i>Strength – Weakness – Opportunities - Threats</i> ) Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	22
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	27
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	54
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE .....</b>	<b>56</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	56

3.2	Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.....	61
3.3	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	73
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE .....</b>	<b>98</b>
4.1	Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	98
4.2	Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 .....	99
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
5.1	Penutup .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone s/d Tahun 2019 (Triwulan 1) .....	10
Tabel 1.1 :	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 .....	15
Tabel T-C 30 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone ...	17
Tabel 1.2 :	Isu-Isu Startegis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	20
Tabel T-C 31 :	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone .....	28
Tabel 1.3 :	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	34
Tabel 1.4 :	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	47
Tabel 1.5 :	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Berserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	58
Tabel 1.6 :	Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Untuk Periode Tahun 2018-2023 ..	61
Tabel 1.7 :	Keterkaitan Antara Rumusan Misi Kabupaten Bone Dengan Pokok Visi Kabupeten Bone .....	63
Tabel 1.8 :	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Beserta Program dan Kegiatan Tahun 2020 Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	65
Tabel T-C 32 :	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone .....	72
Tabel 1.9 :	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 ..	74
Tabel 1.10 :	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dari Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 .....	87

Tabel 1.11	:	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 .....	89
Tabel 1.12	:	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dari Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan Penunjang (Pendukung) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021 ....	97
Tabel 1.13	:	Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Proyeksi Tahun 2020 .....	98
Tabel. 1.14	:	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	100
Tabel 1.15	:	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone .....	113
Tabel T-C 33	:	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone .....	121

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa perubahan paradigma baru di bidang Pemerintahan utamanya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemerintah Daerah (Pemda) pada hakekatnya merupakan bagian dari sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk itu, pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi di setiap wilayah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan paradigma dan tuntutan pembangunan dari *sentralistik* menjadi *desentralistik* tersebut telah memberi infikasi terhadap sistem dari praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada khususnya di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dari semua unsur tersebut yang tidak terpisahkan dari implementasi dan juga perwujudan dari pelaksanaan Refomasi Birokrasi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Salah satu, dokumen Rencana Perangkat Daerah yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang didalamnya memuat tentang program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini dilakukan di setiap Tahun Anggaran secara paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan partisipasi seluruh *stakeholder* yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional.

Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam forum perangkat daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pada setiap perangkat daerah dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga (Renja K/L) terkait.

Hasil terakhir dari perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindak lanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)) disetiap Tahun anggaran.

Proses dan mekanisme dan perencanaan akan lebih bernuansa *bottom up planing*, karena secara langsung dengan perumusan semakin besar untuk terlibat secara langsung dengan perumusan dan aplikasi terhadap berbagai konsepsi perencanaan dan aktifitas pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Kabupaten Bone yang kaya dan sangat potensial disektor pariwisata seperti obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata sejarah serta indikator pendukung kepariwisataan seperti tersedianya akomodasi dan sarana wisata lainnya yang siap menyambut kunjungan wisatawan ke daerah ini, baik wisatawan lokal, wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya perencanaan secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dituangkan dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam kurun waktu tertentu.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 ini, didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hokum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode Dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Norma Ketenruan Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005 s/d Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
22. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kabupaten Bone Tahun 2018 s/d 2023.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja-P SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategis serta kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- ❖ Visi Kabupaten Bone:

**“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING  
DAN SEJAHTERA”**

- ❖ Adapun penjelasan Visi Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

- 🏘️ **Masyarakat Bone Yang Mandiri**

Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;

- 🏘️ **Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing**

Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, kompratif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.

- 🏘️ **Masyarakat Bone Yang Sejahtera**

Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bone tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bone sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

- ✓ Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- ✓ Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya;
- ✓ Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan;
- ✓ Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public;
- ✓ Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja-P SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan maksud mendeskripsikan program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Deskripsi tersebut bertujuan untuk :

- a. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.
- b. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang diusulkan sebagai program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja-P SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT**

##### **DAERAH (RENJA-PD) TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.4 Analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021

**BAB IV : RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

4.2 Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021

**BAB V : PENUTUP**

5.1 Penutup

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun berikutnya.

Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)**

Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun ini (Tahun 2022) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun lalu (Tahun 2020) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2021) yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja Tahun lalu (Tahun 2020) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun berjalan (Tahun 2021).

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2021, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-P PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah kedepannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-P PD) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2021. Secara umum, hasil evaluasinya dapat dilihat pada (*Tabel T-C. 29*) pada *halaman selanjutnya*.



3	26					<b>PARIWISATA</b>									
3	26	01				<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase realisasi capaian perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 0.00.-</b>	<b>Rp. 0.00.-</b>	<b>Rp. 0.00.-</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 4.086.385.571.-</b>	<b>95,46 %</b>
3	26	01	2	02		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100</b>	<b>2.681.529.151.-</b>	<b>94,70 %</b>
3	26	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN (Tahun)	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	36	Rp 2.681.529.151	94,70 %

3	26	01	2	05		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100</b>	<b>Rp 22.125.000.-</b>	<b>100 %</b>
3	26	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan aparat yang diikuti (Laporan)	10	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	10	Rp 22.125.000.-	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target Program Dan Kegiatan (Renja-PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra-PD) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 26 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase realisasi capaian perangkat daerah (%)	100	Rp. 0.00.-	Rp. 0.00.-	Rp. 0.00.-	0,00 %	100	Rp. 4.086.385.571.-	95,46 %
3 26 01 2 06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan	100	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	100	Rp 454.474.442	97,55 %

							<b>administrasi umum perangkat daerah (%)</b>									
3	26	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	22	Rp. 0.00.-	Rp. 0.-	Rp. 0.-	0 %	22	Rp 111.515.100.-	99,88 %	
3	26	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan jasa peralatan rumah tangga sesuai rancangan kebutuhan satu tahun anggaran (Tahun)	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	1	Rp 17.084.900.-	96,16 %	

3	26	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan makan dan minuman harian, rapat bagi aparat perangkat daerah dan tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (Paket)	3	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	3	Rp 74.120.000.-	99,99 %
3	26	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	5	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	5	Rp 72.454.750.-	98,90 %

3	26	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah paket pembayaran bahan bacaan (12 Paket)	8	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	8	Rp 14.350.000.-	99,65 %
3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar negeri yang diikuti oleh aparatur perangkat daerah (Kali)	250	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	250	Rp 164.949.692.-	94,42 %



							<b>milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)</b>								
3	26	01	2	07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan (Unit)	2	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	2	Rp 75.200.000.-	98,94 %
3	26	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Paket)	10	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	10	Rp 69.350.000.-	100 %

3	26	01	2	08		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 557.323.158.-</b>	<b>94,61% %</b>
3	26	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (Rekening)	36	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	36	Rp. 119.560.309.-	96,51 %
3	26	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor (Paket)	5	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	5	Rp 35.996.850.-	99,99 %

3	26	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi, petugas objek wisata dan tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	744	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	744	Rp 401.765.999.-	93,61 %
---	----	----	---	----	----	---------------------------------------	---	-----	-----------	-----------	-----------	--------	-----	------------------	---------



							rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)									
3	26	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara rutin sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	1	Rp. 114.658.320.-	99,73 %	
3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	1	Rp 111.725.500.-	99,94 %	



3	26	02	2	04		<b>Penerapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone (Dokumen)</b>	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	1	Rp. 79.746.700.-	99,87 %
3	26	02	2	04	01	Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah layanan pendaftaran usaha pariwisata yang tersedia (Paket)	1	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	1	Rp. 79.746.700.-	99,87 %



						pariwisata kabupaten/kota	tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata (Laporan)								
3	26	02	2	01		Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pembuatan majalah pariwisata dan film pendek pariwisata (Paket)	2	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	2	Rp. 248.855.150.-	97,16 %
3	26	02	2	01		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Kegiatan)	2	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00 %	2	Rp. 168.720.850.-	99,90 %
3	26	02				<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (%)</b>	<b>12,65 %</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>Rp 0.00.-</b>	<b>0,00 %</b>	<b>12,65 %</b>	<b>Rp. 56.536.700.-</b>	<b>99,55% %</b>

3	26	05	2	01		<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>	<b>Jumlah SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat (Orang)</b>	100	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	Rp 0.00.-	0,00	100	56.536.700	99,55% %
3	26	05	2	01	07	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah peserta yang mengikuti (Orang)	100	Rp. 0.-	Rp. 0.-	Rp. 0.-	0 %	100	Rp. 56.536.700.-	99,55 %

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam hal unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk 5 (lima) Tahun hanya mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-P PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 dimana capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dinyatakan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sarannya.

Kelima indikator kinerja dari tujuan sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut ini :

Tabel 1.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata  
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (DAMPAK/ IMPACT)	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBERNYA
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.	Laporan realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan	Orang	Laporan Karcis Obyek Wisata
		Jumlah rata-rata lama tinggal	Hari	Daftar tamu hotel, wisma, homestay dan penginapan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (DAMPAK/ IMPACT)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBERNYA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Meningkatnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Jumlah peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Pokdarwis	SK. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata hasil evaluasi oleh APIP	Indeks	LHE dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dan analisisnya berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 1 (satu) tujuan 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja tujuan dan sasarnya tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2021 (Triwulan I) untuk pencapaian target jangka menengah Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-P PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 pada (Tabel T-C. 30) di halaman selanjutnya :

**TABEL T-C. 30 :**  
**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 s/d TAHUN 2021)**

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Sasaran I : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata</b>												
1	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan	-	-	-	-	12 ODTW	<b>12 ODTW</b>	12 ODTW	3 ODTW	6 ODTW	-	-
2	Rata-rata lama tinggal	-	-	-	-	2 Hari	<b>2 Hari</b>	2 Hari	-	1,44 Hari	-	-
<p><b>Catatan Analisis :</b> Capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Sasaran I "<i>Meningkatnya kualitas sarana prasarana obyek wisata</i>" dan Indikator I dan II "<i>Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan dan Rata-rata lama tinggal</i>" dapat dikategorikan <i>Tidak Tercapai/Tidak Berhasil</i> mencapai target yang ditentukan pada Tahun kemarin (Tahun 2020 dan Tahun 2021) yang ada dalam RPJMD-P Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Renstra-P Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Kedepannya, masih diperlukan perhatian yang lebih dan masih diperlukan adanya perbaikan dalam pengelolaan baik dari segi fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di lokasi obyek wisata atau di penginapan bagi wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara) yang datang ke lokasi obyek wisata tertentu.</p>												

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Sasaran II : Meningkatnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</b>												
3	Jumlah peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	-	-	-	-	5 Pokdarwis	7 Pokdarwis	9 Pokdarwis	2 Pokdarwis	4 Pokdarwis	5 Pokdarwis	-
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Sasaran II "<i>Meningkatnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</i>" dan Indikator III "<i>Jumlah peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</i>" dapat dikategorikan <i>Tidak Tercapai/Tidak Berhasil</i> mencapai target yang ditentukan pada Tahun kemarin (Tahun 2020 dan Tahun 2021) yang ada dalam Renstra-P Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Kedepannya, masih perlu perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dapat merata di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.</p>												

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata Kabupaten Bone</b>												

4	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hasil evaluasi oleh APIP	-	-	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	<b>BB</b> <b>(&gt;70-80)</b>	BB (>70-80)	B (>60-70)	-	<b>BB</b> <b>(&gt;70-80)</b>	-
---	---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------------------------	----------------	---------------	---	---------------------------------	---

**Catatan Analisis : Capaian kinerja berdasarkan Sasaran III "*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*" dan Indikator kinerja IV "*Prediksi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hasil evaluasi oleh APIP*" dapat dikategorikan *Tercapai / Berhasil* mencapai target yang ditentukan pada Tahun kemarin (Tahun 2020) yang ada dalam Renstra-P Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Kedepannya, masih perlu perbaikan dari seluruh Dokumen SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.**

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diemban oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone ditetapkan tolak ukur melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada *Tabel T-C. 30* di atas.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran beserta indikator kinerja telah memenuhi target Tahunan dan target Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dan tersisa 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya yaitu “*Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisatawan*” dan “*Indeks Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP*” yang belum optimal dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun ini.

Oleh karena itu, kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil dari sasaran “*Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Obyek Wisata*” dan “*Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata*”, perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Terkait dengan hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang berdampak pada kondisi tata kelola pemerintahan daerah khususnya dalam bidang kepariwisataan sebagaimana tersebut di atas, antara lain meliputi :

1. Perencanaan Program Kerja Bidang Kepariwisata yang belum sepenuhnya berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang ada, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penguatan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) produk pariwisata yang masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata dan kinerja pelayanan publik,

- juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan Petugas Obyek Wisata, laporan pengaduan wisatawan dan laporan pengaduan masyarakat;
3. Perencanaan dan penganggaran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip “*money follow program*”, dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini, diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  4. Dukungan dari *stakeholder eksternal* berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jurnalis/ Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

Untuk itu penetapan isu strategis menjadi hal yang mutlak untuk di tentukan agar pencapaian Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 dapat terwujud. Adapun isu-isu strategis dalam lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sebagai berikut ini :

Tabel 1.2.  
Isu-Isu Startegis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)  
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

<b>N O</b>	<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)</b>	<b>M A S A L A H</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan	Belum optimalnya pengembangan usaha kepariwisataan di Kabupaten Bone	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana
2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan fasilitasi sumber daya SDA dan SDM	Masih terbatasnya pemanfaatan potensi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya minat mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan

N O	TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI))	M A S A L A H	A R A H K E B I J A K A N
1	2	3	4
3	Pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan konvensi, insentif dan pameran promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya	Belum optimalnya penggunaan media elektronik (internet) sebagai sarana promosi pemasaran pariwisata terhadap pameran dan event pariwisata yang dapat diakses secara global	Pemahaman tentang penggunaan media informasi dan media teknologi (internet) yang masih terbatas

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) guna pencapaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023 tentunya dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, antara lain :

1. Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
2. Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
3. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata; dan
4. Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, memiliki peran penting dalam mengawal kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bone baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Kabupaten Bone dan penyelesaian tindak lanjut hasil peningkatan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata yang masih belum optimal beserta upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Mengingat hasil capaian kerjanya belum sepenuhnya dapat memberikan dampak dan manfaat yang signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone pada sektor pariwisata. Hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bone yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional yang visi kedepannya menjadi Pemerintahan Tingkat Dunia.

#### 2.4. Analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) adalah suatu instrumen eksternal dan internal yang sudah banyak dipakai. Analisis ini fokus pada basis data perkembangan organisasi menggunakan pola 3-1-5. Arti dari pola tersebut adalah analisa dilakukan berdasarkan data perkembangan organisasi tiga tahun sebelum analisis, kemudian Tahun analisis dilakukan dan pasca analisis untuk perkembangan lima Tahun ke depan.

Kegiatan analisis ini dilakukan agar strategi yang diambil organisasi bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan dasar yang kuat. Biasanya dalam analisis SWOT terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Tantangan) perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi.

Analisis SWOT terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Tantangan). Adapun penjelasan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut ini :

1. *Strength* (Kekuatan) : Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki organisasi seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan organisasi;
2. *Weakness* (Kelemahan) : Analisis terhadap unsur kelemahan yang dimiliki organisasi. Untuk mengetahui kelemahan organisasi bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki organisasi lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Jika ingin membuat daftar kelemahan organisasi secara lebih obyektif bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah organisasi;
3. *Opportunities* (Peluang) : Analisis terhadap unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun sebuah organisasi. Ini karena organisasi dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan organisasi mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
4. *Threats* (Tantangan) : Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah organisasi dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang.

Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**a. Analisa Lingkungan Eksternal**

- 1) Peluang (*Opportunities*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - a) Dukungan kebijakan yang memberikan kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan bidang kepariwisataan;
  - b) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;
  - c) Meningkatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pariwisata;
  - d) Terbukanya link dengan Luar Negeri sehingga mempermudah kunjungan wisatawan dari Luar Negeri untuk datang berkunjung ke Obyek Daya Tarik Wisata yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- 2) Tantangan (*Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - a. Tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum yang merupakan tantangan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui program dan kegiatan di bidang kepariwisataan;
  - b. Dinamika Peraturan Perundang-Undangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi/kewenangan daerah yang terus mengalami perubahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan;
  - c. Tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (*clean government and good governance*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- d. Kompleksitas dari segala aspek yang ada dan terus berkembang dengan dinamika beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), ketersediaan anggaran beserta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
- e. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang masih kurang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Bone belum optimal dalam pencapaiannya;
- f. Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai yang dinilai oleh APIP untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi;
- g. Berkembangnya Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh regional Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia sehingga dibutuhkan *support* yang besar dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

#### **b. Analisa Lingkungan Internal**

1. Kekuatan (*Strengths*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - a. Revitalisasi dan optimalisasi sektor pariwisata yang bermuara pada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - b. Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan daerah (Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone serta Sekda Kabupaten Bone) selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone;
  - c. Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - d. Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eksternal dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Internal lainnya, baik dari Kementerian Pariwisata maupun dari Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Kelemahan (*Weakness*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
- a. Masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja, seperti permasalahan ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang belum memadai;
  - b. Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang masih rendah, khususnya yang terkait dengan manajemen sistem pengawasan program dan kegiatan serta penganggaran yang belum memadai sebagai akibat dari belum cukupnya dampak/manfaat secara signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone;
  - c. Terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, khususnya ruangan gedung kantor, peralatan kerja (komputer), perlengkapan mebeurnya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan;
  - d. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Dari kajian dan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat disimpulkan isu-isu penting yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2021, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berdampak secara optimal untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditinjau dari :
  1. Tingkat capaian implementasi;
  2. Tingkat akuntabilitas kinerja;
  3. Tingkat akuntabilitas keuangan dan asset daerah;
  4. Tingkat maturitas SPIP;
  5. Langkah pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  6. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  7. Tingkat kinerja pelayanan publik dalam penyelenggraan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.

- b. Penanganan atas Laporan Petugas Obyek Wisata, Laporan Pengaduan Wisatawan dan Laporan Pengaduan Masyarakat meski telah beberapa kali mencapai target pada lima (5) Tahun sebelumnya, masih perlu langkah pengoptimalan dan pembenahan dari segi sistem dan dari segi mekanismenya agar aspek transparansi dan aspek akuntabilitas berdampak pada tingkat kepercayaan wisatawan dan masyarakat atas kinerja Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat meningkat terutama yang terkait dengan Obyek Daya Tarik Wisata, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
- c. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan masih perlu dioptimalkan khususnya dalam penanganan kasus yang terindikasi oleh Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), seperti; Pungutan Liar (Pungli), gratifikasi dan benturan kepentingan yang ada didalamnya serta pengembangan *Whistle Blowing System (WBS)* untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Masih belum memadainya tingkat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang kompeten dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitasnya atas penyelenggaraan urusan kepariwisataan.

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023. Pencapaian Visi Misi Bupati Bone periode Tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan :

**“MASYARKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING  
DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut di atas banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung.

Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan

analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kedepannya.

## **2.5. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun (RKT) sebelumnya dan capaian target Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tahun 2018-2023, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD).

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/ kegiatan beserta *outcome/outputnya* agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/ kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (*outcome/output*) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (*outcome/output*) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada (*Tabel T-C. 31*) di halaman selanjutnya.

**Tabel T-C. 31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah**  
**(RKPD) Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

NO	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10		12
I	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	PARIWISATA				Rp. 5.341.085.000.-	PARIWISATA				Rp. 5.341.085.000.-	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Persentase realisasi capaian perangkat daerah teknis (%)	100	Rp. 4.330.118.324.-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Persentase realisasi capaian perangkat daerah teknis (%)	100	Rp. 4.330.118.324.-	

<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 17.985.000.-</b>	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 17.985.000.-</b>	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	30	Rp. 5.000.000.-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	30	Rp. 5.000.000.-	
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)	6	Rp. 6.455.000.-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)	6	Rp. 6.455.000.-	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	3	Rp. 1.530.000.-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	3	Rp. 1.530.000.-	

Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	3	Rp. 5.000.000.-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	3	Rp. 5.000.000.-	
<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 3.051.752.714.-</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 3.051.752.714.-</b>	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN (Tahun)	1	Rp. 3.041.086.114.-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN (Tahun)	1	Rp. 3.041.086.114.-	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1	Rp. 4.535.600.-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1	Rp. 4.535.600.-	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (Laporan)	4	Rp. 6.131.000.-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (Laporan)	4	Rp. 6.131.000.-	

	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 32.839.500.-</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 32.839.500.-</b>	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah pengadaan mesin absensi (Unit)	1	Rp. 3.714.500.-	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah pengadaan mesin absensi (Unit)	1	Rp. 3.714.500.-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah pengadaan pakain kerja untuk aparatur sipil negara, tenaga honorer, dan tenaga lainnya yang diadakan (Pasang)	200	Rp. 950.000.-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Jumlah pengadaan pakain kerja untuk aparatur sipil negara, tenaga honorer, dan tenaga lainnya yang diadakan (Pasang)	200	Rp. 950.000.-	

Dalam tabel tersebut di atas, terdapat perubahan program dan kegiatan beserta sub. kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi, validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Perubahan tersebut merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan sebagai hasil analisis kebutuhan dan beberapa hal yang menjadi catatan penting.

Program dan kegiatan beserta sub. kegiatan yang dimaksudkan sesuai dengan *Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone*, adalah sebagai berikut :

✚ Program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas yang direncanakan mengacu pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.  
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
A.		Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikelola	
1			Penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang ditetapkan	
2			Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata yang direncanakan	
3			Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan	
4			Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dilaksanakan	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
1			Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
2			Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang direncanakan	
3			Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan	
4			Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/reahabilitasi obyek wisata	
5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah orang dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang diberdayakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
1			Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan	
2			Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata	
3			Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan (Obyek)	
4			Pengadaan/pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata	Jumlah <i>detail engineering design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata (Obyek)	
5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan (Obyek)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata (Obyek)	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota (Obyek)	
D		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone	
1			Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah layanan pendaftaran usaha pariwisata yang tersedia	
2			Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diterbitkan	
3			Pengelolaan investasi pariwisata	Jumlah data base mengenai kepariwisataan di kabupaten bone	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	<b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>			<b>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten</b>	
<b>D</b>		<b>Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota</b>		<b>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone</b>	
4			Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	
5			Fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata yang tersedia	
◇	<b>Program pemasaran pariwisata</b>			<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan</b>	
<b>E</b>		<b>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota</b>		<b>Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata</b>	
1			Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pembuatan majalah pariwisata dan film pendek pariwisata	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pemasaran pariwisata			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	
E		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	
2			Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota	Jumlah <i>Workshop</i> promosi dan pemasaran pariwisata	
3			Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah pameran kepariwisataan, penyusunan data base dan profil pariwisata	
4			Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah rapat kerja promosi dan pemasaran pariwisata	
5			Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
F		Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah kabupaten/kota		Persentase pelaku UMKM ekonomi kreatif yang menyediakan zona kreatif	
1			Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
1			Pengembangan riset	Jumlah penelitian ekonomi kreatif yang terlaksana	
2			Pengembangan pendidikan	Jumlah tenaga kerja wisata/ kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terlatih	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
3			Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jumlah UMKM kreatif yang terbentuk	
4			Penyediaan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang tersedia	
5			Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah sistem pemasaran yang dikembangkan	
6			Pemberian insentif	Jumlah insentif yang diberikan	
7			Fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah fasilitasi kekayaan intelektual yang tersedia	
8			Perlindungan hasil kreatifitas	Jumlah kreatifitas yang dilindungi	

9			Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif yang tersusun	
---	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
10			Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah monev pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terlaksana	
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	

<b>H</b>		<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>		<b>Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat</b>	
1			Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah peserta yang mengikuti	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	<b>Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</b>			<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i></b>	
<b>H</b>		<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>		<b>Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat</b>	
2			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat	

3			Pelatihan dasar sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang diikuti	
4			Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersedia	
5			Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	

6			Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat	
7			Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	
<b>I</b>		<b>Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</b>	
1			Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
<b>I</b>		<b>Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</b>	

2			Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	
3			Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif yang tersedia	

✚ Selain program, kegiatan dan sub.kegiatan prioritas yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada 2 (dua) tahun mendatang (Tahun 2022 s/d Tahun 2023). Dinas Pariwisata Kabupaten Bone juga merencanakan program, kegiatan dan sub.kegiatan penunjang (pendukung) pada 2 (dua) tahun mendatang (Tahun 2022 s/d Tahun 2023), adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.4.  
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
A.		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	
4			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
B		Administrasi keuangan perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	
1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan berserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN	
2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
1			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pengadaan mesin absensi	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
2			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian kerja untuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, dan tenaga lainnya yang diadakan	
3			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
4			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	
5			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	

1			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	
---	--	--	--	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
2			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan jasa peralatan rumah tangga sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
3			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan makan dan minum harian, rapat bagi aparat perangkat daerah dan tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	

5			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah paket pembayaran bahan bacaan	
6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar negeri yang diikuti oleh aparatur perangkat daerah	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
7			Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang terpelihara	
E		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)	

1			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan (Unit)	
2			Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
E		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)	
3			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Paket)	
F		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	
1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (Rekening)	

2			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor (Paket)	
3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi, petugas objek wisata dan tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
<b>G</b>		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	
1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara rutin sesuai rencana kebutuhan	
2			Pemeliharaan mebel	Jumlah jasa pemeliharaan mebel sesuai rencana kebutuhan	

3			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	
4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	

Program dan kegiatan beserta sub. kegiatan di atas dikhususkan untuk mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam urusan pariwisata dan memperkenalkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang baru dan potensial ke masyarakat luas.

Penyesuaian yang dilakukan secara umum pada penetapan rumusan indikator kinerja *outcome* dan *output* dari program dan kegiatan yang dilakukan agar lebih berorientasi pada hasil dan memenuhi indikator kinerja yang baik (*SMART : Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, and Time Bound*) dengan target kinerja Tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja Tahun sebelumnya hingga Tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Catatan penting yang disajikan terkait penjelasan sifat prioritas/strategisnya program dan kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang dirumuskan.

## **2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone merupakan perangkat daerah yang secara langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone.

Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta organisasi lainnya selaku *stakeholder eksternal* pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD). Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para *stakeholder eksternal* tersebut untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Namun demikian, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan.

Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kawasan obyek pariwisata dan Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menjadikan hal tersebut sebagai salah satu aspek dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone.

Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan dan penugasan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terkait dengan peyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur dan mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone. Ada 2 (dua) telaahan berdasarkan Rencana Starategis Perubahan (Renstra-P) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yakni sebagai berikut :

##### **a. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone lima (5) Tahun ke depan (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*) khususnya dalam bidang kepariwisataan. Namun demikian, sebagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, lembaga-lembaga pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah sebagai dampak dari hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sesuai dengan Pembangunan kepariwisataan Nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. Pembangunan destinasi pariwisata;
2. Pembangunan industri pariwisata;
3. Pembangunan pemasaran pariwisata; dan
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Sedangkan untuk Pembangunan Industri Pariwisata Nasional meliputi :

- a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari 2 (dua) arah kebijakan dan strategis di atas dapat disimpulkan mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)  
Provinsi Berserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

N O	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Linkage antar daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Terbatasnya sarana dan prasarana Obyek Dan Daya Tarik Wisata(ODTW)	Partisipasi dan promosi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh provinsi
2	Khususnya pada daerah tempat wisata,memiliki produk pariwisata atau tradisi masyarakat yang bernilai tinggi yakni (landscape) alam yakni pegunungan dan bahari yang mempesona.	Daya tarik atau produk wisata yang belum di kemas dengan baik dalam paket kunjungan wisata.	Persepsi atau citra negatif destinasi wisata	Adanya promosi pariwisata baik skala lokal, skala nunsantara maupun skala mancanegara
3	Mewujudkan Upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebijakan lokal Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya sosialisasi produk ekonomi kreatif di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Persepsi tentang apresiasi produk ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah.	Adanya promosi produk ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

**b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari Pengembangan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki potensi obyek yang sangat beragam, baik kawasan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan dalam pengembangannya merupakan bagian penting dari pembangunan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diketahui kawasan pengembangan pariwisata mengarah pada:

- ❖ Kawasan yang diperuntukan untuk wisata budaya di Kabupaten Bone, yang akan dikembangkan meliputi obyek wisata budaya, sebagai berikut:
  - a. Kawasan Museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, kawasan Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubung Tello, kawasan Masjid Raya Watampone, dan kawasan Komplek Mesjid Tua Lalebata di Kecamatan Tanete Riattang;
  - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan Makam Laummasa, kawasan Kuburan Petta Bettae, kawasan Sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - c. Kawasan Manurunge Ri Toro, dan kawasan Perkampungan Suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - d. Kawasan Kompleks Makam Petta PonggawaE dan kawasan Bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone;

- e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan Makam Lualaba Bote'E, kawasan Petta Makkarama, kawasan Permainan Rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan Makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
  - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan Kerajinan Perak dan Kuningan, dan kawasan Pembuatan Baju Bodo di Kecamatan Ajangale;
  - h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;
  - i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
  - j. Kawasan Kerajinan Tangan Anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
  - k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng.
- ❖ Kawasan yang diperuntukan untuk pariwisata alam terutama terkait dengan pengembangan potensi keindahan alam pegunungan dan pantai sebagai berikut :
- a. Kawasan Tanjung Palette dan kawasan Dermaga BajoE di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - b. Kawasan Gua Jepang di Kecamatan Barebbo;
  - c. Kawasan Goa Janci di Kecamatan Awangpone;
  - d. Kawasan Pantai Ujung Pattiro, di Kecamatan Sibulue;
  - e. Kawasan Permandian Alam Lanca, kawasan Mattanempunga, kawasan Lagole dan kawasan Permandian Alam Otting di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan Gua Mampu di Kecamatan Dua Boccoe;
  - g. Kawasan Sumpang Labbu, kawasan Air Terjun Baruttung, dan kawasan Permandian alam Alinge di Kecamatan Ulaweng;
  - h. Kawasan Permandian Alam Taretta di Kecamatan Amali;
  - i. Kawasan Goa Lagaroang di Kecamatan Bengo;
  - j. Kawasan Air Terjun Ladenring di Kecamatan Lamuru;
  - k. Kawasan Goa Bola Batu di Kecamatan Mare;
  - l. Kawasan Pantai Bone Lampe, dan kawasan Pasir Putih Gareccing di Kecamatan Tonra;
  - m. Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng dan kawasan Permandian Waetuwo di Kecamatan Kajuara;
  - n. Kawasan Bendungan Sanrego di Kecamatan Kahu;
  - o. Kawasan Air Terjun Ulu Ere di Kecamatan Bontocani;
  - p. Kawasan Mata Air Panassaweng di Kecamatan Ponre;
  - q. Kawasan Uttang Menroja di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - r. Kawasan Bendungan Salomekko di Kecamatan Salmekko; dan
  - s. Kawasan Permandian Alam Duppamatae di Kecamatan Palakka.
- ❖ Kawasan pengembangan pariwisata buatan, terdiri dari kawasan Wisata Water Boom dan wisata Kuliner, yang akan dikembangkan di Kabupaten Bone, terdiri atas:

- a. Kawasan Wisata Water Boom Tanjung Palatte di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- b. Kawasan Wisata Kuliner Pusat Jajan Watampone di Kecamatan Tanete Riatang Barat;
- c. Kawasan Wisata Kuliner Pantai Kering di Kecamatan Tanete Riattang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Untuk Periode Tahun 2018-2023

<b>N O</b>	<b>KODE INIDKATOR</b>	<b>INDIKATOR TPB</b>	<b>TARGET RPJMD TAHUN 2018-2023</b>	<b>TARGET RPJPD</b>	<b>SKENARIO</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	1157,38	3396,13	Tanpa Upaya Tambahan Target Tercapai
2	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	250.000	300.000	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara, meningkat sulit dicapai pada tahun 2019 sampai Tahun 2030, dikarenakan kecenderungannya menurun sehingga diperlukan upaya tambahan.

### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Visi dan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rencana teknokratis) dalam masa transisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dari periode 5 (lima) Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju periode 5 (lima) Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023). Visi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

**MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA  
SAING, DAN SEJAHTERA**

❖ Adapun penjelasan Visi Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

**✚ Masyarakat Bone Yang Mandiri**

Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;

**✚ Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing**

Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, kompratif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.

**✚ Masyarakat Bone Yang Sejahtera**

Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut, maka ditetapkan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- ✓ Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- ✓ Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya;
- ✓ Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan;
- ✓ Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public;
- ✓ Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6.  
Keterkaitan Antara Rumusan Misi Kabupaten Bone  
Dengan Pokok Visi Kabupaten Bone

<b>N O</b>	<b>MISI</b>	<b>PENJELASAN MISI</b>	<b>POKOK VISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Visi dan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone tersebut di atas kemudian diangkat menjadi tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi, yaitu :

**MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG MANDIRI DAN  
BERDAYA SAING**

Ada 1 (satu) Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

**MENINGKATKAN BUDAYA POLITIK, PENEGAKAN HUKUM, DAN SENI BUDAYA DALAM KEMAJEMUKAN MASYARAKAT.**

Sesuai Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.7. di halaman selanjutnya.

**TABEL 1.7. :**  
**TUJUAN DAN SASARAN SKPD TAHUN 2022**

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata			PAD Sektor Pariwisata	Rp. 1.000.000. 000.-	Rp. 1.000.000.000.-	
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone oleh APIP	BB	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
							Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
							Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
							Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

							Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
							Evaluasi kinerja perangkat daerah
							<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
							Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
							Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone oleh APIP	BB	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
							Administrasi kepegawaian perangkat daerah
							Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
							Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
							Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
							Administrasi umum perangkat daerah

							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
							Penyediaan peralatan rumah tangga
							Penyediaan bahan logistik kantor
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone oleh APIP	BB	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
							Administrasi umum perangkat daerah
							Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
							Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
							Pengadaan mebel

							Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
							<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
							<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Bone oleh APIP	BB	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan	12 ODTW	12 ODTW	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
				Jumlah rata-rata lama tinggal	2 Hari	2 Hari	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota

							Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota
							<b>Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</b>
							Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota
							<b>Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota</b>
							Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
							Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
							Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan	12 ODTW	12 ODTW	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
				Jumlah rata-rata lama tinggal	2 Hari	2 Hari	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
							Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
							Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/ kota
							Pengelolaan inventasi pariwisata
							Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata
							Program pemasaran pariwisata

							<b>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata kabupaten/kota</b>
							Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri
							Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota
							Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
							Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2022)	PROGRAM - KEGIATAN - SUB. KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	3	Meningkatnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Jumlah peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	9 Pokdarwis	7 Pokdarwis	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
							Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
							Pengembangan Pendidikan
							Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, direncanakan terdiri dari 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan serta dengan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis serta 5 (lima) indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022.

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
---

<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>
--

Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi Di Dunia Usaha
--

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada Tahun 2022, termasuk rencana program dan kegiatan terkait dapat dilihat pada (Tabel T-C. 32) di *halaman berikutnya* :

**TABEL T-C. 32 :**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN (MUSRENBANG TAHUN 2022)**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>* Hasil Musrenbang Kecamatan :</b>					
1	Pembangunan mushollah	Objek wisata goa mampu, desa cabbeng kecamatan dua bocco'e kabupaten bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Desa
2	Pembangunan villa dan aula	RT 02, Dusun Lamputoae, Kecamatan Kajuara (Angkue) Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Desa
3	Pembangunan villa dan aula	Dusun 1 Latonro, Desa Latonro, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Desa
4	Pembangunan villa dan aula	Desa baringeng kecamatan libureng kabupaten bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Desa
5	Pembangunan talut pemecah ombak	Dusun Lebbae, Desa Mario, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Kecamatan
6	Pembangunan villa dan aula	Dusun Kara, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	100 X 400 Meter	Musrenbang Desa

7	Pembangunan pusat jajanan/kuliner	Kecamatan Bengo Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Kecamatan
8	Pembangunan pusat jajanan/kuliner	Kelurahan Maroanging Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 Paket	Musrenbang Kelurahan

### **3.3. Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan di atas dan yang akan dicapai dalam jangka pendek (1 Tahun) berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis pada Tahun 2022.

Disamping itu, hal tersebut juga mempunyai tujuan untuk mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam perencanaan kinerja Tahun 2022, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan serta pembangunan dan pengembangan di sektor kepariwisataan dalam mengelola Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, para pejabat struktural mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV beserta seluruh jajarannya yang ada dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan Nasional yang terkait pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kepariwisataan, pengentasan kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), pencapaian NSPK bidang kepariwisataan dan berdasarkan urusan pemerintahan daerah utamanya di bidang kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah terbentuk di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2022.

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, direncanakan terdiri dari 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan serta dengan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ada 4 (tiga) program prioritas dengan 8 (delapan) kegiatan serta dengan 15 (lima belas) sub kegiatan yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8.  
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
A.		Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikelola	
1			Penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang ditetapkan	
2			Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata yang direncanakan	
3			Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan	
4			Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dilaksanakan	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
1			Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
2			Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang direncanakan	
3			Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan	
4			Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/reahabilitasi obyek wisata	
5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah orang dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang diberdayakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
1			Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan	
2			Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata	
3			Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan (Obyek)	
4			Pengadaan/pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata	Jumlah <i>detail engineering design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata (Obyek)	

5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan (Obyek)	
---	--	--	---	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata (Obyek)	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota (Obyek)	
D		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone	
1			Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah layanan pendaftaran usaha pariwisata yang tersedia	
2			Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diterbitkan	

3			Pengelolaan investasi pariwisata	Jumlah data base mengenai kepariwisataan di kabupaten bone	
---	--	--	----------------------------------	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
D		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone	
4			Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	
5			Fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata yang tersedia	
◇	Program pemasaran pariwisata			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	
E		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	

1			Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pembuatan majalah pariwisata dan film pendek pariwisata	
---	--	--	---	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pemasaran pariwisata			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	
E		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	
2			Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota	Jumlah <i>Workshop</i> promosi dan pemasaran pariwisata	
3			Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah pameran kepariwisataan, penyusunan data base dan profil pariwisata	
4			Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah rapat kerja promosi dan pemasaran pariwisata	

5			Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	
---	--	--	---	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
F		Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah kabupaten/kota		Persentase pelaku UMKM ekonomi kreatif yang menyediakan zona kreatif	
1			Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	

<b>G.</b>		<b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>	
1			Pengembangan riset	Jumlah penelitian ekonomi kreatif yang terlaksana	
2			Pengembangan pendidikan	Jumlah tenaga kerja wisata/ kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terlatih	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	<b>Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual</b>			<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	
<b>G.</b>		<b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>	
3			Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jumlah UMKM kreatif yang terbentuk	
4			Penyediaan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang tersedia	
5			Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah sistem pemasaran yang dikembangkan	

6			Pemberian insentif	Jumlah insentif yang diberikan	
7			Fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah fasilitasi kekayaan intelektual yang tersedia	
8			Perlindungan hasil kreatifitas	Jumlah kreatifitas yang dilindungi	
9			Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif yang tersusun	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
10			Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah monev pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terlaksana	

◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	
1			Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah peserta yang mengikuti	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	

2			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat	
3			Pelatihan dasar sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang diikuti	
4			Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersedia	
5			Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	

<b>H</b>		<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>		<b>Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat</b>	
6			Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat	
7			Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	
<b>I</b>		<b>Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</b>	
1			Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
I		Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	
2			Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	
3			Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif yang tersedia	

Dari uraian program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 di atas mempunyai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang ingin dicapai, yakni :

Tabel 1.9  
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dari Program, Kegiatan  
Dan Sub. Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (DAMPAK &amp; IMPACT)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) melalui perbaikan infrastruktur, membuka Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) baru melalui kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	
2		Meningkatnya kualitas pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan Jumlah rata-rata lama tinggal	Mengembangkan promosi pariwisata yang terintegrasi dalam program-program yang setara melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam promosi, pengembangan model promosi pariwisata berbasis masyarakat	Mewujudkan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang makin dikenal luas oleh masyarakat	
3		Meningkatnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Jumlah peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat, memberdayakan masyarakat di daerah obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Mendorong keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan	

Sementara itu, ada 6 (enam) program penunjang (pendukung) dengan 7 (tujuh) kegiatan penunjang (pendukung) serta 26 (dua puluh enam) sub.kegiatan penunjang (pendukung) yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.10.  
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
A.		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	
4			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
B		Administrasi keuangan perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	
1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan berserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN	
2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
1			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pengadaan mesin absensi	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
2			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian kerja untuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, dan tenaga lainnya yang diadakan	
3			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
4			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	
5			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	

1			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
<b>D</b>		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
2			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan jasa peralatan rumah tangga sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
3			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan makan dan minum harian, rapat bagi aparat perangkat daerah dan tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	
5			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah paket pembayaran bahan bacaan	

6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar negeri yang diikuti oleh aparatur perangkat daerah	
---	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
7			Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang terpelihara	
E		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)	
1			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan (Unit)	

2			Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	
3			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Paket)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
F		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	
1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (Rekening)	
2			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor (Paket)	
3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi, petugas objek wisata dan tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
G		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	
1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara rutin sesuai rencana kebutuhan	
2			Pemeliharaan mebel	Jumlah jasa pemeliharaan mebel sesuai rencana kebutuhan	
3			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	
4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	

Dari uraian program dan kegiatan penunjang (pendukung) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 di atas mempunyai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang ingin dicapai, yakni :

Tabel 1.11  
 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dari Program, Kegiatan  
 Dan Sub. Kegiatan Penunjang (Pendukung) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (DAMPAK & IMPACT)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata hasil evaluasi oleh APIP	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan layanan Aparatur dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Terpenuhinya tata kelola pelayanan jasa kepariwisataan	

**BAB IV.**  
**RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA**  
**KABUPATEN BONE**

**4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam rentang periode 5 (lima) Tahun (Recana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)) berjalan, yaitu Tahun 2018-2023, setiap Tahunnya telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.12.  
Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2018-2023 dan Proyeksi Tahun 2022

T A H U N	PAGU ANGGARAN			PRESEN TA SE terhadap Total Belanja APBD
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5
2018	Rp. 2.480.147.671.-	Rp. 4.997.170.000.-	Rp. 7.477.317.671.-	100 %
2019	Rp. 2.956.662.841.-	Rp. 5.417.763.750.-	Rp. 8.374.426.591.-	100 %
2020	Rp. -	Rp. 18.168.101.200.-	Rp. -	0,0 %
2021	Rp. 5.081.201.609.-	Rp. 6.016.551.609.-	Rp. 11.097.753.218. -	100 %
2022	Rp. 5.083.435.272.-	Rp. 5.340.131.500.-	Rp. 10.423.566.772. -	100 %
2023	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,0 %

- **Catatan** : Pagu anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan proyeksi dengan asumsi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

#### **4.2. Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2023**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2022 (terlampir pada Bab 3 Point 3.3) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepannya berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, direncanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaan (anggaran) yang ditentukan untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023.

Disamping untuk mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam perencanaan kinerja Tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan serta pengembangan dan pembangunan sektor kepariwisataan dalam hal ini Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan Nasional yang terkait pencapaian SDGs sektor kepariwisataan, pengentasan kemiskinan masyarakat, pencapaian NSPK sektor kepariwisataan dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah sektor kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah ada di Kecamatan di Kabupaten Bone. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023.

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, direncanakan terdiri dari 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan serta dengan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ada 4 (tiga) program prioritas dengan 8 (delapan) kegiatan serta dengan 15 (lima belas) sub kegiatan yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13.  
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
A.		Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikelola	
1			Penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang ditetapkan	
2			Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata yang direncanakan	
3			Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan	
4			Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dilaksanakan	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
1			Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
2			Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang direncanakan	
3			Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan	
4			Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/reahabilitasi obyek wisata	
5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah orang dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang diberdayakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
B.		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
1			Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan	
2			Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah <i>Detail Engineering Design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata	
3			Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan (Obyek)	
4			Pengadaan/pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata	Jumlah <i>detail engineering design</i> (DED) obyek wisata destinasi pariwisata (Obyek)	

5			Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan (Obyek)	
---	--	--	---	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
C.		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah obyek destinasi pariwisata yang dikelola	
6			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana obyek destinasi wisata (Obyek)	
7			Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota (Obyek)	
D		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone	
1			Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah layanan pendaftaran usaha pariwisata yang tersedia	
2			Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diterbitkan	

3			Pengelolaan investasi pariwisata	Jumlah data base mengenai kepariwisataan di kabupaten bone	
---	--	--	----------------------------------	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
D		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di kabupaten bone	
4			Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	
5			Fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata yang tersedia	
◇	Program pemasaran pariwisata			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	
E		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	

1			Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pembuatan majalah pariwisata dan film pendek pariwisata	
---	--	--	---	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pemasaran pariwisata			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	
E		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	
2			Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota	Jumlah <i>Workshop</i> promosi dan pemasaran pariwisata	
3			Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah pameran kepariwisataan, penyusunan data base dan profil pariwisata	
4			Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah rapat kerja promosi dan pemasaran pariwisata	

5			Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	
---	--	--	---	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
F		Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah kabupaten/kota		Persentase pelaku UMKM ekonomi kreatif yang menyediakan zona kreatif	
1			Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	

1			Pengembangan riset	Jumlah penelitian ekonomi kreatif yang terlaksana	
2			Pengembangan pendidikan	Jumlah tenaga kerja wisata/ kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terlatih	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
G.		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
3			Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jumlah UMKM kreatif yang terbentuk	
4			Penyediaan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang tersedia	
5			Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah sistem pemasaran yang dikembangkan	
6			Pemberian insentif	Jumlah insentif yang diberikan	

7			Fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah fasilitasi kekayaan intelektual yang tersedia	
8			Perlindungan hasil kreatifitas	Jumlah kreatifitas yang dilindungi	
9			Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif yang tersusun	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
◇	<b>Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual</b>			<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	
<b>G.</b>		<b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>	
10			Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah monev pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terlaksana	

◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	
1			Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah peserta yang mengikuti	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	

2			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat	
3			Pelatihan dasar sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang diikuti	
4			Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersedia	
5			Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
H		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata meningkat	
6			Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat	
7			Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	
I		Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	
1			Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi sektor pariwisata terhadap <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	
I		Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		Persentase peningkatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	
2			Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	
3			Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif yang tersedia	

Sementara itu, ada 1 (enam) program penunjang (pendukung) dengan 7 (tujuh) kegiatan penunjang (pendukung) serta 26 (dua puluh enam) sub.kegiatan penunjang (pendukung) yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.14.  
 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penunjang (Pendukung) Yang Direncanakan  
 Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
A.		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	
4			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
B		Administrasi keuangan perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	
1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan berserta tambahan penghasilan bulan bagi ASN	
2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	
3			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
1			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pengadaan mesin absensi	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
C		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	
2			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian kerja untuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, dan tenaga lainnya yang diadakan	
3			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
4			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	
5			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	

1			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	
---	--	--	--	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
2			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan jasa peralatan rumah tangga sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
3			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan makan dan minum harian, rapat bagi aparat perangkat daerah dan tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	
4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	

5			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah paket pembayaran bahan bacaan	
6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar negeri yang diikuti oleh aparatur perangkat daerah	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
D		Administrasi umum perangkat daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
7			Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang terpelihara	
E		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)	
1			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan (Unit)	

2			Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	
---	--	--	-----------------	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
E		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah (%)	
3			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Paket)	
F		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	
1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (Rekening)	
2			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor (Paket)	

3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi, petugas objek wisata dan tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	
---	--	--	---------------------------------------	---	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM-KEGIATAN- SUB. KEGIATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
◇	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Cakupan realisasi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	
G		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan realisasi kebutuhan laporan periodik ikhtisar hasil pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	
1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara rutin sesuai rencana kebutuhan	
2			Pemeliharaan mebel	Jumlah jasa pemeliharaan mebel sesuai rencana kebutuhan	

3			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	
4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan (Tahun)	

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-P PD) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021-2023, indikator sasaran, indikator dan target kinerja program dan kegiatan serta sub.kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 yang merupakan *outcome*, *output*, dan *input* masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan.

Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai *input* program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023. Selain itu, ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target *outcome/output* program dan kegiatan, rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, secara lengkap dapat dilihat pada (Tabel T-C. 33) di halaman selanjutnya.

**Tabel T-C. 33 :**  
**Rencana Program & Kegiatan Dispar 2022 dan Prakiraan Maju 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26	PARIWISATA			Rp. 5.341.085.000.-				Rp. 26.204.500.000.-	
3	26	01	Program penunjang urusan pemerintahan	Persentase realisasi capaian perangkat daerah teknis (%)	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	100	Rp. 4.330.118.324.-	Dana Transfer Umum (DTU) - Dana Alokasi Umum (DAU)	100	Rp. 6.993.000.000.-

						daerah kabupaten/ kota								
3	26	01	2	01		<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase realisasi kebutuhan dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (%)</b>	<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 17.985.000.-</b>	<b>Dana Transfer Umum (DTU) - Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 154.000.000.-</b>	
3	26	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	30	Rp. 5.000.000.-	Dana Transfer Umum (DTU) - Dana Alokasi Umum (DAU)	30	Rp. 55.000.000.-	
3	26	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	6	Rp. 6.455.000.-	Dana Transfer Umum (DTU) - Dana Alokasi Umum (DAU)	6	Rp. 27.500.000.-	
3	26	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai	Dinas Pariwisata Kabupaten Bone	3	Rp. 1.530.000.-	Dana Transfer Umum (DTU) - Dana Alokasi Umum (DAU)	3	Rp. 27.500.000.-	





## **BAB V PENUTUP**

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam sektor kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah.

Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) Tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan orientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone pada bidang kepariwisataan, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah terbentuk di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola destinasi pariwisata yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata dan sarana prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata beserta peran

serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang baik dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, direncanakan terdiri dari 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan serta dengan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis serta 5 (lima) indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) ke depan, yaitu sebagai berikut :

- a. Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
- b. Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- c. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana serta fasilitasi penunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone.

Dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu ditindaklanjuti proses pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja *outcome/output* dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
2. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) baru.
3. Mendorong Aparatur untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengemabangkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pariwisata.
5. Mendorong keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Mewujudkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang makin dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Mewujudkan Aparatur yang peduli dengan perekonomian kreatif.
8. Intensitas koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkatkan sehubungan dengan usaha pariwisata.

Kedepannya, diharapkan agar peningkatan alokasi anggaran untuk Penguatan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sesuai dengan pagu indikatif yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan Dinas

Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022, dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga idealnya dapat mencapai nilai minimal 0,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone pada Tahun 2022 nanti.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada Tahun 2022, yaitu, *"Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing"* sehingga tercipta, *"Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"*.

Watampone, 13 September 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE,**



**IL ANDI PROMAE PAWLST., M.Si.**

Pangkat: Pembina Tingkat I

NIP. 19700517-199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
**DINAS PARIWISATA**

Jalan Yos Sudarso Email: [dinaspariwisatakabbone@yahoo.com](mailto:dinaspariwisatakabbone@yahoo.com)

W A T A M P O N E

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE  
NOMOR :           TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE,**

- Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana strategis perangkat daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis serta berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022.
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022, adalah :
- a. Menyusunan agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022, mulai dari tahap persiapan hingga ditetapkannya peraturan Bupati Bone tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Bone Tahun 2022;
  - b. Mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022;
  - c. Menyampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Badan Penelitian dan pengembangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
pada tanggal : 31 Agustus 2021



***Tembusan : Kepada Yth.***

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone di Watampone
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
6. *Pertinggal*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE TAHUN 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-PD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| ✚ Pembina          | : | Kepala Dinas Pariwisata   |
| ✚ Penanggung Jawab | : | Sekretaris Dinas Pariwisata   |
| ✚ Ketua Tim        | : | Kasubag. Program  |
| ✚ Sekretaris       | : | Kasubag. Keuangan   |
| ✚ Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;</li><li>2. Kepala Bidang Promosi Dan Pemasaran;</li><li>3. Kepala Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan, Dan Tempat Wisata;</li><li>4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif;</li><li>5. Kasubag. Umum dan Kepegawaian;</li><li>6. Sub. Koordinator Industri Pariwisata;</li><li>7. Sub. Koordinator Tata Kelola Destinasi;</li><li>8. Sub. Koordinator Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata;</li><li>9. Sub. Koordinator Promosi;</li><li>10. Sub. Koordinator Analisa Data Dan Pengembangan Pasar;</li><li>11. Sub. Koordinator Pembinaan Event Pariwisata;</li><li>12. Sub. Koordinator Pembinaan Hotel, Rumah Makan Dan Tempat Wisata;</li><li>13. Sub. Koordinator Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;</li><li>14. Sub. Koordinator Tenaga Kerja Wisata</li><li>15. Sub. Koordinator Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek);</li></ol> |

16. Sub. Koordinator Pembinaan Ekonomi Kreatif;
17. Sub. Koordinator Kerjasama dan Fasilitasi
18. Arianti,SH.;
19. Rosida,S.Sos.;
20. Andi Dahlia,S.Sos.;
21. Herlinda,S.S.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BONE,**



**IL ANDI PROMAE FAWLST.,M.SI.**

Pangkat Pembina Tingkat I

NIP. 19700517 199503 1 003